

Penguatan Peran Masyarakat RW 08 Kelurahan Tomang dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui *Community Action Plan*

**Wisely Yahya^{*1}, Marselinus Nirwan Luru², Hanny Wahidin Wiranegara³,
Rahel Situmorang⁴, Sarah Aphirta⁵, Fahmi Amel Dwi Tama⁶**

^{1,2,3,4,6}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

⁵Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*e-mail: wisely.yahya@trisakti.ac.id¹

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.90 tahun 2018, peningkatan kualitas permukiman kumuh tersebut dapat dilaksanakan melalui Community Action Plan (CAP). Beberapa RW di Kelurahan Tomang tergolong kumuh ringan-sedang. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah agar masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan terkait kondisi prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui program CAP. Kegiatan berupa penyuluhan secara langsung kepada warga RW 08 Kelurahan Tomang. Penyampaian materi melalui presentasi dan diskusi dengan peserta penyuluhan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta penyuluhan mampu mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan terkait prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman dan terjadi peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan mengenai Community Action Plan sebagai suatu pendekatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Kata kunci: *Community Action Plan, Peran Masyarakat, Permukiman*

Abstract

Based on the Governor of Jakarta Regulation No. 90 of 2018, improving the quality of slum settlements can be implemented through a Community Action Plan (CAP). Several community units in the Tomang urban village are classified as mild-moderate slums. The purpose of community service is for the community to be able to identify needs and problems related to the condition of infrastructure, facilities and utilities in residential areas and to increase public awareness regarding the important role of the community in improving the quality of the residential environment through the CAP program. Activities in the form of direct counseling to residents of RW 08 Tomang Village. Submission of material through presentations and discussions with participants. The results of this community service activity were that participants were able to identify problems and needs related to infrastructure, facilities and utilities in residential areas and there was an increase in the knowledge of participants regarding the Community Action Plan as an approach that could be taken by the community in order to improve the quality of the settlement environment.

Keywords: *Community Action Plan, Community Role, Settlement*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil kajian Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, terdapat 445 lokasi Rukun Warga yang tergolong kumuh. Jakarta Barat memiliki RW kumuh terbanyak kedua (92 RW kumuh) setelah Jakarta Pusat. Kota Jakarta Barat memiliki kecamatan dengan jumlah RW kumuh sebanyak 10 RW atau lebih, yang terdiri dari Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Grogol Petamburan, dan Kecamatan Kali Deres. Kecamatan Grogol Petamburan memiliki tiga kelurahan dengan RW kumuh, diantaranya adalah Kelurahan Tomang.

Kota dan pemukiman yang berkelanjutan merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11 dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan manajemen kota menjadi salah satu indikator dalam rangka mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman,

tangguh dan berkelanjutan. Saat ini paradigma pembangunan partisipatif sedang digalakkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan membuka ruang aspirasi seluas-luasnya demi terciptanya pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Radin et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.90 tahun 2018, sebanyak 445 lokasi RW kumuh perlu dilakukan peningkatan kualitas permukiman melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat. *Community Action Plan* (CAP) adalah rencana aksi peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat. CAP diselenggarakan dengan tujuan agar warga dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan.

CAP diharapkan memiliki keluaran (output) berupa matriks persoalan dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi, data dan analisa sosial ekonomi masyarakat, Detail Engineering Design (DED) sebagai bahan pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang akan dibangun serta tema dan model penataan kampung yang menjadi konsep umum pelaksanaan kegiatan Collaborative Implementation Program (CIP). Setelah CAP, terbitlah Collaborative Implementation Program (CIP) yang merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP.

Pada Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kali ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa matriks persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada lingkungan permukiman. Pada konteks tata kelola perkotaan/manajemen kota, opini/persepsi publik merupakan salah satu ide inti dari perencanaan kota partisipatif dan dalam hal peningkatan kualitas hidup (Afroj et al., 2021). Dengan demikian, dalam menyusun matriks persoalan dan kebutuhan masyarakat mengenai PSU lingkungan permukiman, diperlukan penilaian masyarakat (skala 1 sangat tidak baik hingga 5 sangat baik mengenai kondisi eksisting PSU pada lingkungan permukiman) serta diskusi lebih lanjut mengenai persoalan pada lingkungan permukiman.

Kelurahan Tomang memiliki permukiman kumuh kategori ringan-sedang (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). Dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman pada Kelurahan Tomang, diperlukan penguatan peran masyarakat melalui sosialisasi program CAP (*Community Action Plan*) serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat mengenai PSU. Matriks tersebut akan menjadi masukkan bagi instansi kelurahan sebagai langkah awal program CAP. Dengan demikian, tujuan PkM ini adalah agar masyarakat pada kelurahan RW kumuh dapat mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan terkait kondisi prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui program CAP.

2. METODE

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan “Penguatan Peran Masyarakat RW 08 Kelurahan Tomang dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui *Community Action Plan*”, dilakukan koordinasi dengan pihak RW 08 yang terdiri dari ketua RW 08, kelompok PKK dan karang taruna. Persiapan dilakukan secara online melalui komunikasi dengan Whatsapp Group. Tim PkM menginfokan mengenai waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan sasaran peserta penyuluhan kepada pihak RW 08. Kegiatan PkM secara umum dapat dilihat pada gambar berikut.



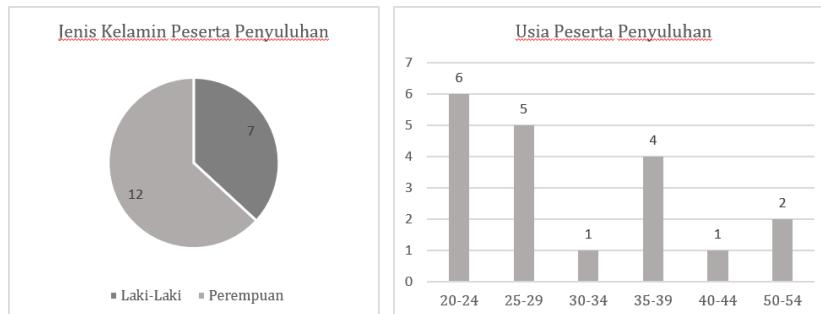
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah melalui penyuluhan mengenai peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman melalui program CAP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara pendampingan dalam bentuk penyuluhan sehingga penyuluhan dipilih sebagai metode pelaksanaan kegiatan PkM. Adapun tahapan pelaksanaan PkM adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran pemahaman peserta penyuluhan mengenai CAP dan penilaian masyarakat mengenai kondisi PSU pada lingkungan permukiman melalui pengisian kuesioner (pra penyuluhan/*pretest*)
- b. Penyuluhan *Community Action Plan* (CAP) secara umum, terdiri dari:
 - 1) Definisi umum mengenai CAP dan peningkatan kualitas permukiman
 - 2) Gambaran umum mengenai kondisi eksisting Kelurahan Tomang
 - 3) Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu
 - 4) Keterkaitan CAP dan CIP serta contoh praktik baik yang telah dilaksanakan
- c. Diskusi mengenai persoalan dan kebutuhan mengenai PSU pada lingkungan permukiman
- d. Pengukuran pemahaman peserta penyuluhan mengenai CAP dan penilaian masyarakat mengenai kondisi PSU pada lingkungan permukiman melalui pengisian kuesioner (pasca penyuluhan/*post-test*)

Pengukuran pemahaman peserta penyuluhan mengenai penilaian kualitas lingkungan permukiman dilakukan dengan deskriptif kuantitatif melalui metode skoring (Ulimaz et al., 2022). Beberapa layanan perkotaan dapat dipersepsikan secara individu maupun secara kolektif (Swindell dan Kelly, 2005). Tinjauan penelitian terdahulu mengenai studi distribusi layanan dan kepuasan warga diukur pada tingkat individu terlebih dahulu (Swindell dan Kelly, 2005; Afroj et al., 2021). Dalam rangka mengukur persepsi peserta penyuluhan, maka digunakan pengukuran skala sikap dengan skala likert dengan lima alternatif jawaban (Boone dan Boone, 2012). Data berupa skala likert diperoleh dari jawaban peserta penyuluhan yaitu "1=Sangat Tidak Baik", "2=Tidak Baik", "3=Cukup Baik", "4=Baik", dan "5=Sangat Baik". Skor rata-rata merepresentasikan persepsi masyarakat mengenai kondisi PSU pada lingkungan permukiman. Adapun rentang interval dapat diperoleh melalui perhitungan interval kelas (I) = Jarak sebaran (skor tertinggi-terendah) / Kelas. Dengan demikian interval per kategori adalah 0,8 (STB = 1-1,8 ; TB = 1,81-2,6; CB = 2,61-3,4; B = 3,41-4,2; SB = 4,21-5).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 25 Februari 2023 pukul 09.00-11.00 secara luring di Gedung K (FATL) Universitas Trisakti. Peserta penyuluhan terdiri dari 19 orang warga RW 08 Kelurahan Tomang. Peserta penyuluhan didominasi oleh kelompok usia 20-29 tahun dan mayoritas peserta penyuluhan adalah perempuan.



Gambar 2. Profil Peserta Penyuluhan

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran diri/kelompok masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui program CAP dan agar masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan terkait kondisi prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman. Adapun susunan acara pada saat pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Susunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu	Acara
08.30 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.30	Pembukaan kegiatan PkM Sambutan oleh Ketua Tim PkM Sambutan oleh Ketua RW 08 Kelurahan Tomang
09.30 – 09.40	Pretest
09.40 – 10.10	Penyuluhan Penguatan Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui <i>Community Action Plan</i> , meliputi penjelasan mengenai: <ul style="list-style-type: none">Definisi umum mengenai CAP dan peningkatan kualitas permukimanGambaran umum mengenai kondisi eksisting Kelurahan TomangSosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman TerpaduKeterkaitan CAP dengan CIP
10.10 – 10.25	Diskusi dan Pengisian Matriks Persoalan dan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Lingkungan Permukiman oleh Peserta Penyuluhan
10.25 – 10.35	Post-test
10.35 – 11.00	Foto Bersama dan Penutupan Kegiatan

Pada kegiatan PkM, materi yang disampaikan meliputi definisi umum mengenai CAP dan peningkatan kualitas permukiman, gambaran umum mengenai kondisi eksisting Kelurahan Tomang, serta sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang merupakan inti dari materi penyuluhan yang terdiri dari penjelasan mengenai:

- Pendekatan penataan Kawasan: aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemerdayaan sosial dan budaya, aspek pemberdayaan ekonomi
- Kriteria penetapan CAP
- Output CAP: matriks persoalan dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi, data dan analisa sosial ekonomi masyarakat, tema dan model penataan kampung, Detail Engineering Design (DED) sebagai bahan pembangunan infrastruktur.
- Tahapan penyusunan CAP: persiapan, survey, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan dokumen DED



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka mengevaluasi kegiatan PkM, maka dilaksanakan analisis dari hasil *pretest* dan *post-test* peserta penyuluhan. Adapun hasil evaluasi ditinjau melalui pengukuran pemahaman peserta penyuluhan mengenai CAP, penilaian peserta penyuluhan mengenai kondisi lingkungan permukiman serta pengisian matriks kebutuhan dan persoalan pada lingkungan permukiman berdasarkan persepsi peserta penyuluhan.

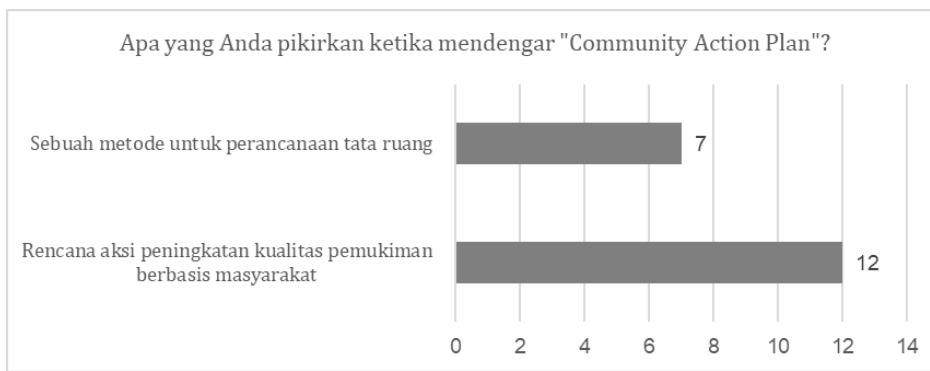
3.1. Pemahaman Peserta Penyuluhan Mengenai *Community Action Plan*

Pada saat pra penyuluhan/*pretest*, peserta penyuluhan memiliki jawaban yang bervariasi mengenai makna *Community Action Plan* (CAP). Dari 19 peserta penyuluhan, sebanyak 5 peserta (26%) tidak mengetahui mengenai *Community Action Plan*. Peserta penyuluhan yang menjawab CAP sebagai bentuk perencanaan, penyampaian pendapat, persepsi sangat baik serta rencana masyarakat untuk meningkatkan kualitas permukiman merupakan jawaban yang moderat (48%). Selebihnya merupakan jawaban responden yang sudah mendekati dan yang telah sesuai kata kunci (26%).



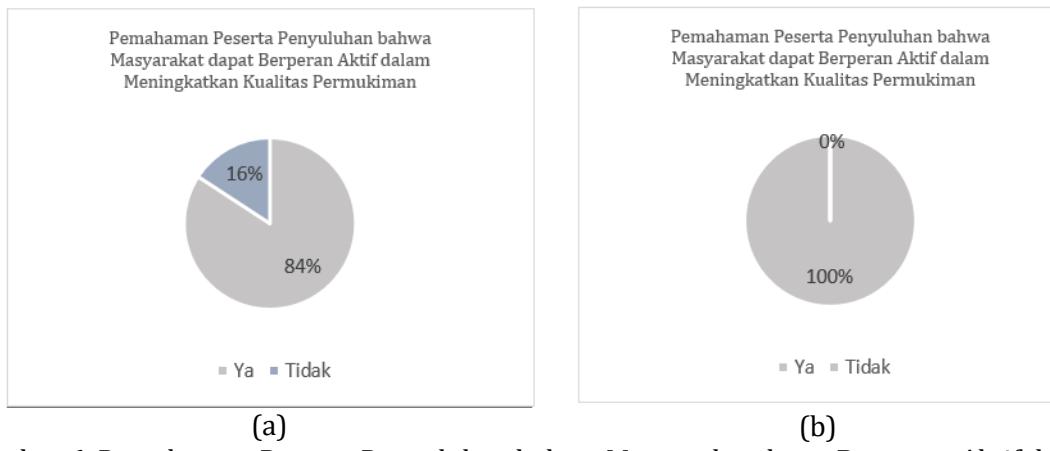
Gambar 4. Pemahaman Peserta Penyuluhan Mengenai *Community Action Plan* pada Saat *Pretest*

Selanjutnya pada saat pasca penyuluhan/*post-test*, peserta penyuluhan memiliki jawaban yang tergolong homogen dengan jawaban yang sesuai dengan materi penyuluhan adalah 12 peserta penyuluhan (63%).



Gambar 5. Pemahaman Peserta Penyuluhan Mengenai *Community Action Plan* pada Saat *Post-test*

Selain itu, pemahaman masyarakat juga diukur melalui pertanyaan "Apakah Anda mengetahui bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman?". Pada *pretest*, masih terdapat peserta penyuluhan yang tidak mengetahui (16%) bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas permukiman sekitarnya, sedangkan pada saat *post-test* peserta penyuluhan telah memiliki jawaban yang sama (100%) yaitu mengetahui bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas permukiman sekitarnya.



Gambar 6. Pemahaman Peserta Penyuluhan bahwa Masyarakat dapat Berperan Aktif dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman (a) *Pretest* (b) *Post-test*

3.2. Penilaian Peserta Penyuluhan Mengenai Kondisi Lingkungan Permukiman

Pada pelaksanaan PkM, peserta penyuluhan diarahkan untuk mengisi penilaian mengenai kondisi PSU pada lingkungan permukiman. Pada saat *pretest*, peserta penyuluhan menilai bahwa kondisi sanitasi, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, PJU dan fasilitas kesehatan tergolong baik, sedangkan jalan dan jalur pejalan kaki serta kondisi RTH dalam keadaan cukup baik. Adapun jawaban peserta pada saat *pretest* adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penilaian Kondisi Lingkungan Permukiman (*Pretest*)

No.	Prasarana, Sarana dan Utilitas	Frekuensi Jawaban					Rata-Rata Skor	Kategori
		Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik		
1.	Sanitasi/ pengolahan limbah	0	3	7	7	2	3,42	Baik
2.	Drainase	0	0	8	8	3	3,74	Baik
3.	Air bersih	0	0	5	9	5	4,00	Baik
4.	Pengelolaan sampah	0	2	3	11	3	3,79	Baik
5.	Jalan dan jalur pejalan kaki	2	1	6	8	2	3,37	Cukup Baik
6.	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	1	3	11	3	3,74	Baik
7.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	2	9	5	2	3,26	Cukup Baik
8.	Fasilitas Kesehatan	0	1	7	7	4	3,74	Baik

Pada saat *post-test*, peserta penyuluhan masih menilai bahwa kondisi sanitasi, drainase, air bersih, pengelolaan sampah tergolong baik oleh peserta penyuluhan. Namun, jenis infrastruktur yang tergolong cukup baik mengalami penambahan yaitu terdiri dari jalan dan jalur pejalan kaki, PJU, RTH dan fasilitas kesehatan. Terdapat sedikit perubahan penilaian pasca penyuluhan, yang berarti peserta penyuluhan telah melakukan koreksi kembali penilaian mereka mengenai kondisi eksisting pada lingkungan permukiman mereka.

Tabel 3. Penilaian Kondisi Lingkungan Permukiman (*Post-test*)

No.	Prasarana, Sarana dan Utilitas	Frekuensi Jawaban					Rata-Rata Skor	Kategori
		Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik		
1.	Sanitasi/ pengolahan limbah	0	3	6	8	2	3,46	Baik
2.	Drainase	0	0	7	10	2	3,73	Baik
3.	Air bersih	0	1	9	7	2	3,50	Baik
4.	Pengelolaan sampah	0	0	8	10	1	3,61	Baik
5.	Jalan dan jalur pejalan kaki	0	1	11	6	1	3,39	Cukup Baik
6.	Penerangan Jalan Umum (PJU)	0	4	9	5	1	3,18	Cukup Baik
7.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0	7	9	2	1	2,84	Cukup Baik
8.	Fasilitas Kesehatan	0	5	7	6	1	3,18	Cukup Baik

3.2. Identifikasi Kebutuhan dan Persoalan pada Lingkungan Permukiman Berdasarkan Persepsi Peserta Penyuluhan

Pada pelaksanaan PkM, terdapat sesi diskusi mengenai daftar persoalan dan kebutuhan infrastruktur pada lingkungan permukiman peserta penyuluhan serta keberadaan kelembagaan untuk mendukung terlaksananya CAP. Berdasarkan sesi diskusi terdapat beberapa persoalan dan kebutuhan infrastruktur yang disepakati oleh peserta penyuluhan.

Tabel 4. Matriks Persoalan dan Kebutuhan PSU di Kelurahan Tomang Berdasarkan Hasil Diskusi

No.	Persoalan	Kebutuhan Penyediaan Infrastruktur
1.	Terdapat genangan air	Drainase
2.	Meningkatnya kasus pencurian motor	Penerangan Jalan Umum
3.	Terbatasnya kuantitas dan kondisi air bersih yang berumber dari PDAM	Ketersediaan (Kuantitas dan Kontinuitas) Air Bersih
4.	Masih diperlukannya septic tank komunal	Progress saat ini adalah penentuan lokasi dan pengadaan lahan septic tank komunal

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.90 tahun 2018, pada bagian penetapan CAP dinyatakan bahwa Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun *Community Action Plan* dengan melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Adapun kelembagaan yang potensial pada Kelurahan Tomang yang dapat menginisiasi CAP adalah:

- Tim Penggerak PKK Kelurahan, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam hal:
 - Program daur ulang, bank sampah tiap RW, sampah diubah menjadi kerajinan
 - Terdapat dasawisma, petugas medis rutin datang 1 bulan 2x untuk melakukan pengecekan kesehatan. Penyelenggaraan posyandu (balita) dan lansia menjadi prioritas.
- Kepala Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam hal:
 - Program kebersihan lingkungan
 - Program keamanan lingkungan

- 3) Pelayanan masyarakat
- c. Karang Taruna, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wadah generasi muda untuk pembinaan dan mendukung program kebersihan lingkungan, keamanan dan program yang terdapat di RT/RW.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Community Action Plan*, terbukti dari kesesuaian jawaban responden yang mengalami peningkatan dari 26% menjadi 63%. Peserta penyuluhan telah mampu melakukan penilaian terhadap kondisi lingkungan permukiman serta dapat mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan terkait penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada lingkungan permukiman. Hasil diskusi menunjukkan bahwa penyediaan drainase, PJU, air bersih, dan septic tank komunal menjadi catatan untuk perbaikan pada lingkungan permukiman di Kelurahan Tomang. Program CAP berhasil ketika terdapat partisipasi aktif dari masyarakat untuk menginisiasi program tersebut yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan yang potensial, diantaranya adalah Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ketua RT/RW dan Karang Taruna. Adapun saran untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang serupa adalah diperlukan lebih banyak peserta penyuluhan terutama yang berasal dari RW dengan kategori kumuh berat agar kesadaran masyarakat mengenai peningkatan kualitas permukiman dapat terbangun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti yang telah memberi dukungan finansial pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada warga RW 08 Kelurahan Tomang atas antusiasme dan kerjasamanya pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroj, S., Hanif, F., Hossain, M. Bin, Fuad, N., Islam, I., Sharmin, N., & Siddiq, F. (2021). Assessing the municipal service quality of residential neighborhoods based on SERVQUAL, AHP and Citizen's Score Card: A case study of Dhaka North City Corporation area, Bangladesh. *Journal of Urban Management*, 10(3), 179–191. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.03.001>
- Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert data. *Journal of Extension*, 50(2).
- BPS. (2017). Dki Jakarta 2017 Transportasi. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta 2017*.
- Bappenas. (2020). Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan. In Kementerian PPN/Bappenas. https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II_REV3.pdf
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. (2021). *CAP & CIP*. Diakses melalui [https://jakarta.go.id/cap-cip#:~:text=Community%20Action%20Plan%20\(CAP\)%20merupakan,permukiman%20yang%20sesuai%20dengan%20kebutuhan](https://jakarta.go.id/cap-cip#:~:text=Community%20Action%20Plan%20(CAP)%20merupakan,permukiman%20yang%20sesuai%20dengan%20kebutuhan).
- Peraturan Gubernur DKI JAKARTA No 18. (2018). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. (pp. 1–15). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/4492/peraturan-gubernur-nomor-90-tahun-2018-tentang-peningkatan-kualitas-permukiman-dalam-rangka-penataan-kawasan-permukiman-terpadu>

- Peraturan Pemerintah RI No 14. (2016). Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5735/pp-no-14-tahun-2016>
- Riadin, A. M., Aditya, T., & Nurhakim. (2019). Evaluasi Program *Community Action Plan* (Cap) Dalam Penataan Kampung Kumuh Dki Jakarta (Studi Kasus Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan). *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi 4.0*, 635-653.
- Swindell, D., & Kelly, J. (2005). Performance measurement versus city service satisfaction: Intra-city variations in quality? *Social Science Quarterly*, 86(3), 704-723.
<https://doi.org/10.1111/j.0038-4941.2005.00325.x>
- Ulimaz, M., Pratama, R. Y., Dewanti, A. N., & Syafitri, E. D. (2022). Assessment of Settlement Quality Levels in Balikpapan Kota Subdistrict, Balikpapan, Indonesia. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 19(1), 55-67.
<https://doi.org/10.14710/presipitasi.v19i1.55-67>

Halaman Ini Dikosongkan